

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah laporan pertanggungjawaban 7 (tujuh) Biro sebagai unit Perangkat Daerah yakni Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab selama Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban kepada *stakeholders* dan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menunjang visi dan misi pembangunan daerah sesuai Rencana Kinerja Tahun 2023.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggung jawaban kepada *stakeholders* serta sebagai data dan informasi bagi peningkatan kinerja organisasi di tahun yang akan datang.

Kupang, Februari 2024  
Sekretaris Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kosmas D. Lana

PARAF HIERARKI	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Administrasi Pimpinan	
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai media yang menyajikan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Dalam LKIP Tahun 2023 ini, dipaparkan kinerja yang dicapai 7 (Tujuh) Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang terdiri dari Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan yang diuraikan secara substansi berdasarkan dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, RKT dan Perjanjian Kinerja) hingga deskripsi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dicapai, baik dalam hal capaian kinerja *output*, capaian kinerja *outcomes* maupun akuntabilitas keuangan. Selain itu, laporan kinerja ini bertujuan untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2023.

Sekretariat Daerah melalui setiap Biro mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT “**NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**” dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi 7 (tujuh) Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT adalah misi ke-5 (lima) yaitu: “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Pertanggung jawaban kinerja dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dilaporkan berdasarkan realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada 7 (tujuh) Biro Lingkup Setda Provinsi NTT terdiri dari 16 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja. Adapun sasaran masing-masing Biro yang akan dideskripsikan terdiri dari:

1. Biro Pemerintahan
  - Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
  - Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama
  - Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan
2. Biro Hukum
  - Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan
  - Terwujudnya pengelolaan bantuan hukum
3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

- Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik
  - Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- Terlaksana proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku
  - Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa
  - Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
5. Biro Organisasi
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif
6. Biro Umum
- Terwujudnya Pelayanan yang Professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
7. Biro Administrasi Pimpinan
- Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien
  - Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan
  - Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel

Pengukuran capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar **105,48 %**, sehingga kategori pencapaian kinerja Sekretariat Daerah NTT Tahun 2023 “**SANGAT BAIK**” karena memiliki hasil capaian kinerja sasaran melebihi target yang direncanakan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang **Menunjang** pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dengan Realisasi Kinerja Dukungan anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 83.591.936.786,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.183.886.867,- (81,57%).

Akhirnya melalui LKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 dan semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* terkait.

DAFTAR ISI

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1

KATA PENGANTAR .....i

LEMBAR EKSEKUTIF .....ii

DAFTAR ISI .....iv

DAFTAR TABEL .....iii

DAFTAR GAMBAR .....iii

BAB I PENDAHULUAN .....1

    1.1 Latar Belakang .....1

    1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....3

    1.3 Aspek Strategis Organisasi .....12

    1.4 Landasan Hukum .....13

    1.5 Sistematika .....14

    1.6 Sumber Daya Manusia .....15

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....27

    2.1 Rencana Strategis .....27

    2.2 Rencana Kinerja .....41

    2.3 Perjanjian Kinerja .....43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....47

    3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....48

    3.2 Realisasi Anggaran .....94

BAB IV PENUTUP .....102

    4.1 Kesimpulan .....102



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM Setda Prov. NTT berdasarkan Jenis Kelamin .....	16
Tabel 1.2 SDM Setda Prov. NTT berdasarkan Golongan Ruang .....	16
Tabel 1.3 SDM Setda Prov. NTT berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	19
Tabel 1.4 SDM Setda Prov. NTT berdasarkan Kelompok Usia.....	21
Tabel 1.5 Rekapitulasi Barang Inventaris Setda Provinsi NTT .....	22
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Setda Provinsi NTT .....	31
Tabel 2.2 Misi yang didukung oleh Setda Provinsi NTT .....	35
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Setda Tahun 2023 .....	41
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Setda Tahun 2023 .....	44
Tabel 2.5 Program dan Anggaran Setda Provinsi NTT Tahun 2023 .....	46
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	49
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Pemerintahan .....	50
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Hukum .....	52
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan .....	58
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa .....	62
Tabel 3.6 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD .....	63
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Organisasi .....	50
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Umum .....	71
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Administrasi Pimpinan	72
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 .....	74
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Target Renstra 2018-2023 ...	77
Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja .....	80
Tabel 3.13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	85
Tabel 3.14 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	90
Tabel 3.15 Realisasi APBD 7 Biro Lingkup Setda Provinsi NTT Tahun 2023.....	94
Tabel 3.16 Realisasi Dana APBN Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Satker Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT .....	11
--	----

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai media yang menyajikan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Dalam LKIP Tahun 2023 ini, dipaparkan kinerja yang dicapai 7 (Tujuh) Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang terdiri dari Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan yang diuraikan secara substansi berdasarkan dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, RKT dan Perjanjian Kinerja) hingga deskripsi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dicapai, baik dalam hal capaian kinerja *output*, capaian kinerja *outcomes* maupun akuntabilitas keuangan. Selain itu, laporan kinerja ini bertujuan untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2023.

Sekretariat Daerah melalui setiap Biro mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT “**NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**” dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi 7 (tujuh) Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT adalah misi ke-5 (lima) yaitu: “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Pertanggung jawaban kinerja dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dilaporkan berdasarkan realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada 7 (tujuh) Biro Lingkup Setda Provinsi NTT terdiri dari 16 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja. Adapun sasaran masing-masing Biro yang akan dideskripsikan terdiri dari:



1. Biro Pemerintahan
  - Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
  - Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama
  - Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan
2. Biro Hukum
  - Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan
  - Terwujudnya pengelolaan bantuan hukum
3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
  - Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik
  - Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
  - Terlaksana proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku
  - Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa
  - Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
5. Biro Organisasi
  - Peningkatan Kualitas Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publiik yang efektif, akuntable, transparan serta partisipatif
6. Biro Umum
  - Terwujudnya Pelayanan yang Professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
7. Biro Administrasi Pimpinan

- Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan
- Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel

Pengukuran capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar **105,48 %**, sehingga kategori pencapaian kinerja Sekretariat Daerah NTT Tahun 2023 “**SANGAT BAIK**” karena memiliki hasil capaian kinerja sasaran melebihi target yang direncanakan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang **Menunjang** pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dengan Realisasi Kinerja Dukungan anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 83.591.936.786,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.183.886.867,- (81,57%).

Akhirnya melalui LKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 dan semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* terkait.

## DAFTAR ISI

### LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1

#### KATA

#### PENGANTAR

i

#### LEMBAR

#### EKSEKUTIF

ii

#### DAFTAR

#### ISI

v

#### DAFTAR

#### TABEL

vi

#### DAFTAR

#### GAMBAR

vii

#### BAB

#### I

#### PENDAHULUAN

1

1.1 Latar

Belakang

1

1.2 Struktur

Organisasi

dan

Tata

Kerja

3

1.3 Aspek

Strategis

Organisasi

12

1.4 Landasan

Hukum

13

1.5	Sistematika		
14			
1.6	Sumber	Daya	Manusia
15			
<b>BAB</b>	<b>II</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>KINERJA</b>
<b>27</b>			
2.1	Rencana		Strategis
27			
2.2	Rencana		Kinerja
41			
2.3	Perjanjian		Kinerja
43			
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
<b>47</b>			
3.1	Capaian	Kinerja	Organisasi
48			
3.2	Realisasi		Anggaran
94			
<b>BAB IV PENUTUP</b>			
<b>102</b>			
4.1	Kesimpulan		
102			

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	SDM	Setda	Prov.	NTT	berdasarkan	Jenis	Kelamin
.....								
16								
Tabel	1.2	SDM	Setda	Prov.	NTT	berdasarkan	Golongan	Ruang
.....								
16								
Tabel	1.3	SDM	Setda	Prov.	NTT	berdasarkan	Tingkat	Pendidikan
.....								
19								
Tabel	1.4	SDM	Setda	Prov.	NTT	berdasarkan	Kelompok	Usia
.....								
21								
Tabel	1.5	Rekapitulasi		Barang	Inventaris	Setda	Provinsi	NTT
.....								
22								
Tabel	2.1	Tujuan		dan	Sasaran	Setda	Provinsi	NTT
.....								
31								
Tabel	2.2	Misi	yang		didukung	oleh	Setda	Provinsi NTT
.....								
35								
Tabel	2.3	Rencana		Kinerja		Setda	Tahun	2023
.....								
41								
Tabel	2.4	Perjanjian		Kinerja		Setda	Tahun	2023
.....								
44								
Tabel	2.5	Program		dan Anggaran		Setda	Provinsi NTT	Tahun 2023
.....								
46								

Tabel	3.1	Skala	Nilai	Peringkat	Kinerja
.....					
49					
Tabel	3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Pemerintahan			
.....					
50					
Tabel	3.3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Hukum			
.....					
52					
Tabel	3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Perekonomian dan			
		Administrasi		Pembangunan	
.....					
58					
Tabel	3.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Pengadaan Barang			
		dan		Jasa	
.....					
62					
Tabel	3.6	Paket	Pengadaan	yang	bersumber dai APBD
.....					
63					
Tabel	3.7	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Organisasi			
.....					
50					
Tabel	3.8	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Umum			
.....					
71					
Tabel	3.9	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Biro Administrasi			
		Pimpinan			
.....					
72					
Tabel	3.10	Target	dan	Realisasi	Kinerja Tahun 2021-2023
.....					
74					

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Target Renstra 2018-2023

77

Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

80

Tabel 3.13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

85

Tabel 3.14 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

90

Tabel 3.15 Realisasi APBD 7 Biro Lingkup Setda Provinsi NTT Tahun 2023

94

Tabel 3.16 Realisasi Dana APBN Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Satker Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

10



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT

.....

11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fondasi utama penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai, hal ini merupakan salah satu instrumen penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan Good Governance.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah analisis pengukuran kinerja dan evaluasi yang memadai.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

Yang menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
2. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

## 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pembinaan administratif Aparatur Sipil Negara, perangkat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan administrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 7 (tujuh) biro, 15 (lima belas) bagian dan 7 (tujuh) sub bagian.

### a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian pengrusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir 2 (dua)

Biro yaitu :

1. Biro Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

## 2. Biro Hukum

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/ Kota dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugas Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bantuan hukum;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bantuan hukum;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bantuan hukum;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bantuan hukum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

### b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
- f. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir 2 (dua) Biro yaitu :

1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.



## 2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

### c. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum serta administrasi pimpinan;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum mengkoordinir 3 (tiga) Biro yaitu :

1. Biro Organisasi

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Dalam melaksanakan tugas Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

## 2. Biro Umum

Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah. Dalam melaksanakan tugas Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

## 3. Biro Administrasi Pimpinan

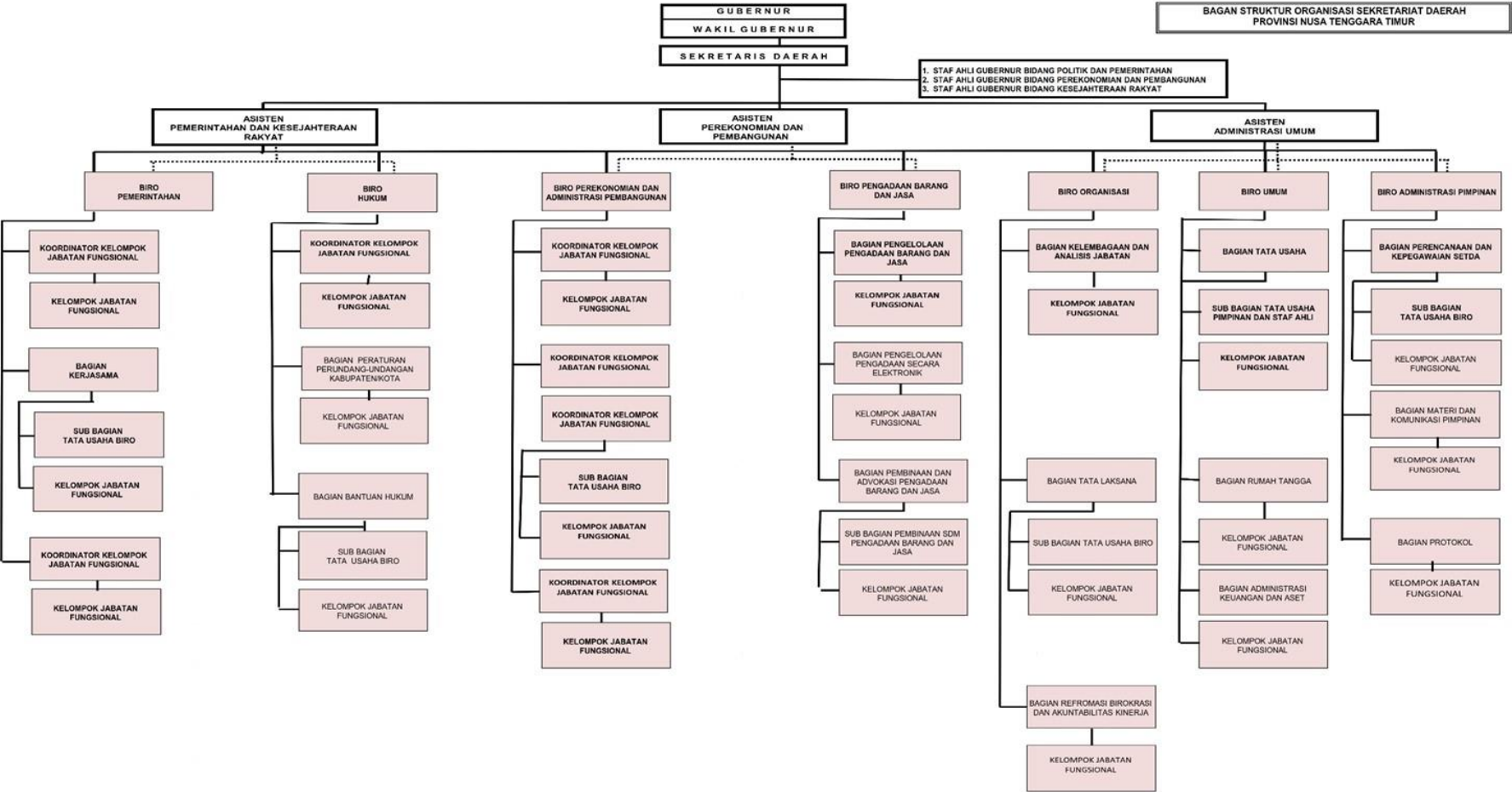
Mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol. Dalam melaksanakan tugas Biro Administrasi pimpinan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;

- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Adapun bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Gambar 1.1 bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



**KETERANGAN:**

----- GARIS KOMANDO

----- GARIS KOORDINASI

### **1.3. Aspek Strategis Organisasi**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa mendatang. Isu strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu belum adanya keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban ruang, khususnya terkait dengan pola ruang lindung dan budidaya, hal ini antara lain disebabkan mekanisme pasar yang dinamis dan lemahnya pengendalian dan penertiban perda RTRW.

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam Koordinasi Penyelenggaraan Urusan dan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Perangkat Daerah.

Dengan menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari RENSTRA Perangkat Daerah provinsi dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah serta faktor Penghambat dan Pendorong Koordinasi Penyelenggaraan Urusan dan Pembangunan daerah, maka Ada 3 (tiga) Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi yaitu:

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah,
2. Belum optimalnya kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun,
3. Belum optimalnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

#### **1.4. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi;



9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDA-Unit SKPD) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 Nomor: DPA/A.1/401.507.0.00.01.0000/001/202.

## 1.5 Sistematika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran.**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum terhadap capaian kinerja organisasi serta Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**1.6 Sumber Daya Sekretariat Daerah**

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang memiliki kapasitas yang tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja secara lebih optimal.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pegawai sebanyak 376 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga terdapat pada beberapa potensi permasalahan, yaitu:

- a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b) Pola pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi;

- c) Penerapan sistem manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

**Tabel. 1.1**  
**Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi NTT**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**(Kondisi Desember 2023)**

ASN 7 Biro Lingkup Setda Provinsi NTT	Pangkat/ Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
330	IV	31	11	42
	III	139	95	234
	II	43	10	53
	I	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>214</b>	<b>116</b>	<b>330</b>

**Tabel. 1.2**  
**Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi NTT**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**(Kondisi Desember 2023)**

No	Nama Biro	Pangkat/ Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	IV/e	1	-	1
		IV/d	2	1	3
		IV/c	1	-	1
		IV/b	-	-	-
		IV/a	-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
2	Biro Pemerintahan	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	1	-	1
		IV/b	1	1	2
		IV/a	2	0	2
		<b>Jumlah Gol. IV</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
		III/d	9	10	19
		III/c	2	2	4
		III/b	5	1	6
		III/a	6	1	7
		<b>Jumlah Gol. III</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>36</b>

No	Nama Biro	Pangkat/ Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
		II/d	1	1	2
		II/c	1	1	2
		II/b	1	-	1
		II/a	-	-	-
		<b>Jumlah Gol. II</b>	3	2	5
		I/d	-	-	-
		<b>Jumlah Gol. I</b>	-	-	-
3	Biro Hukum	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>46</b>
		IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	1	-	-
		IV/b	-	-	2
		IV/a	3	2	5
		<b>Jumlah Gol. IV</b>	4	2	6
		III/d	9	3	12
		III/c	5	1	6
		III/b	4	3	7
		III/a	1	1	2
		<b>Jumlah Gol. III</b>	19	8	27
		II/d	-	-	-
		II/c	-	-	-
		II/b	-	-	-
		II/a	-	-	-
		<b>Jumlah Gol. II</b>	-	-	-
		<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>
4	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	1	-	1
		IV/b	2	1	3
		IV/a	1	2	3
		<b>Jumlah Gol. IV</b>	4	3	7
		III/d	3	13	16
		III/c	1	1	2
		III/b	-	2	2
		III/a	4	3	7
		<b>Jumlah Gol. III</b>	8	19	27
		II/d	1	-	1
		II/c	3	-	3
		II/b	-	1	1
		II/a	-	-	-
		<b>Jumlah Gol. II</b>	4	1	5
		<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>39</b>
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	-	-	-
		IV/b	3	-	3
		IV/a	3	-	3
		<b>Jumlah Gol. IV</b>	6	-	6
		III/d	17	7	24

No	Nama Biro	Pangkat/ Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
		III/c	9	1	10
		III/b	1	-	1
		III/a	2	-	2
		<b>Jumlah Gol. III</b>	29	8	37
		II/d	2	1	3
		II/c	1	-	1
		II/b	-	-	-
		II/a	-	-	-
		<b>Jumlah Gol. II</b>	3	1	4
		<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>47</b>
6	Biro Organisasi	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	-	1	1
		IV/b	2	-	2
		IV/a	3	-	3
		<b>Jumlah Gol. IV</b>	5	1	6
		III/d	5	5	10
		III/c	-	-	-
		III/b	4	5	9
		III/a	2	4	2
		<b>Jumlah Gol. III</b>	11	14	25
		II/d	-	-	-
		II/c	-	-	-
		II/b	1	-	1
		II/a	-	-	-
		<b>Jumlah Gol. II</b>	1	1	2
		<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
7	Biro Umum	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	-	-	-
		IV/b	2	-	2
		IV/a	1	-	1
		<b>Jumlah Gol. IV</b>	3	-	3
		III/d	6	2	8
		III/c	3	5	8
		III/b	13	10	23
		III/a	11	4	15
		<b>Jumlah Gol. III</b>	33	21	54
		II/d	7	1	8
		II/c	11	3	14
		II/b	11	-	11
		II/a	1	-	1
		<b>Jumlah Gol. II</b>	30	4	34
		I/d	1	-	1
		<b>Jumlah Gol.I</b>	1	-	1
		<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	<b>92</b>
8	Biro Administrasi Pimpinan	IV/e	-	-	-
		IV/d	-	-	-
		IV/c	-	-	-

No	Nama Biro	Pangkat/ Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
		IV/b	-	2	2
		IV/a	1	1	2
		<b>Jumlah Gol. IV</b>	1	3	4
		III/d	2	-	2
		III/c	5	3	8
		III/b	7	5	11
		III/a	3	4	7
		<b>Jumlah Gol. III</b>	17	11	34
		II/d	1	1	2
		II/c	-	-	1
		II/b	-	-	-
		II/a	1	-	1
		<b>Jumlah Gol. II</b>	2	1	3
		<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
<b>Jumlah ASN 7 Biro</b>			<b>214</b>	<b>116</b>	<b>330</b>

**Tabel. 1.3**  
**Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi NTT**  
**Berdasarkan Pendidikan**  
**(Kondisi Desember 2023)**

No	Nama Biro	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Magister (S2)	4	1	5
2	Biro Pemerintahan	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	5	1	6
		Sarjana (S1/D4)	19	12	31
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	-	1	1
		SLTA/SMK/KPAA	4	3	7
		SLTP	1	-	1
		SD	-	-	0
		<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>46</b>
3	Biro Hukum	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	3	4	7
		Sarjana (S1/D4)	16	5	28
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	1	-	1
		SLTA/SMK/KPAA	3	1	4
		SLTP	-	-	-
		SD	-	-	-

No	Nama Biro	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
		Jumlah	23	10	33
4	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Doktor (S3)	1	-	1
		Magister (S2)	5	2	8
		Sarjana (S1/D4)	5	18	23
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	-	1	1
		SLTA/SMK/KPAA	5	2	7
		SLTP	-	-	-
		SD	-	-	-
		Jumlah	16	23	39
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	11	2	13
		Sarjana (S1/D4)	24	5	29
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	-	-	-
		SLTA/SMK/KPAA	3	2	5
		SLTP	-	-	-
		SD	-	-	-
		Jumlah	38	9	47
5	Biro Organisasi	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	6	2	8
		Sarjana (S1/D4)	8	10	18
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	1	-	1
		SLTA/SMK/KPAA	1	4	5
		SLTP	-	-	-
		SD	-	-	-
		Jumlah	16	16	32
6	Biro Umum	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	1	1	2
		Sarjana (S1/D4)	14	12	26
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	2	3	5
		SLTA/SMK/KPAA	38	9	47
		SLTP	10	-	10
		SD	2	-	2
		Jumlah	67	25	92
7	Biro Administrasi Pimpinan	Doktor (S3)	-	-	-
		Magister (S2)	2	1	3
		Sarjana (S1/D4)	15	12	25
		Sarjana Muda (D1/D2/S3)	-	-	-
		SLTA/SMK/KPAA	2	3	5
		SLTP	1	-	1
		SD	-	-	-
		Jumlah	20	16	36
Jumlah ASN 7 Biro			214	116	330



**Tabel. 2.4**  
**Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi NTT**  
**Berdasarkan Kelompok Usia**  
**(Kondisi Desember 2023)**

No	Nama Biro	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	51 – 60	4	1	5
		41 – 50	-	-	-
		31 – 40	-	-	-
		21 – 30	-	-	-
		Jumlah	4	1	5
2	Biro Pemerintahan	51 – 60	12	9	21
		41 – 50	10	6	16
		31 – 40	5	1	6
		21 – 30	2	1	3
		Jumlah	29	17	46
3	Biro Hukum	51 – 60	8	4	12
		41 – 50	8	3	11
		31 – 40	5	2	7
		21 – 30	2	1	3
		Jumlah	23	10	33
4	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	51 – 60	10	5	15
		41 – 50	3	13	16
		31 – 40	2	4	6
		21 – 30	1	1	2
		Jumlah	16	23	39
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	51 – 60	14	4	18
		41 – 50	13	4	17
		31 – 40	9	1	10
		21 – 30	2	-	2
		Jumlah	38	9	47
6	Biro Organisasi	51 – 60	5	3	8
		41 – 50	5	5	10
		31 – 40	4	4	8
		21 – 30	2	4	5
		Jumlah	16	16	32
7	Biro Umum	51 – 60	31	7	38
		41 – 50	24	9	33
		31 – 40	10	5	15
		21 – 30	2	4	6
		Jumlah	67	25	92
8	Biro Administrasi Pimpinan	51 – 60	-	2	8
		41 – 50	9	3	12
		31 – 40	7	4	10
		21 – 30	-	6	11
		Jumlah	21	16	36
Jumlah ASN 7 Biro			214	116	330

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur utama manajemen yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain SDM, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan, pedoman kerja, kelembagaan (struktur organisasi) yang tertata serta adanya mekanisme kerja (SOP dan SPP) merupakan faktor pendukung dalam capaian pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021, Tanah Gedung Sasando (Jl. El Tari Nomor 52 Kota Kupang) tercatat seluas 64,515 M<sup>2</sup>, dengan luas Bangunan Gedung Sasando adalah 18,287 M<sup>2</sup> yang dipergunakan sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup 7 (tujuh) Biro sebagai Unit Kerja pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu didukung dengan sarana prasarana sebagaimana tertera pada Rekapitulasi Barang Investasi Kantor sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**(Kondisi Desember 2023)**

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Meja Biro (Pejabat Eselon III)	7	7	-	-
2	Meja ½ Biro (Pejabat Eselon IV)	58	58	-	-
3	Meja ½ Biro	58	58	-	-
4	Meja Kerja (Pejabat Eselon IV)	5	5	-	-
5	Meja Pegawai Non Struktural	28	28	-	-
6	Kursi Roda Berputar (Pejabat Eselon II)	2	2	-	-
7	Kursi Roda Putar	16	16	-	-
8	Kursi Pegawai Non Struktural	155	155	-	-
9	Kursi Fernekel	45	45	-	-
10	Kursi Biasa	27	9	18	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
11	Kursi Besi	10	10	-	-
12	Sofa	9	9	-	-
13	Filling Besi	40	39	1	-
14	Dispenser	3	3	-	-
15	Papan Whiteboard	3	2	1	-
16	Monitor Komputer	60	51	3	6
17	CPU Komputer	21	15	-	6
18	Printer	78	67	1	10
19	Line Printer	1	-	-	-
20	Keyboard	21	15	-	6
21	Lemari untuk Arsip Dinamis	37	37	-	-
22	Mobil Toyota Rush	4	4	-	-
23	Lemari/Kayu	7	7	-	-
24	Lemari Kayu Dua Pintu	1	1	-	-
25	Lemari Kayu Tiga Pintu	1	1	-	-
26	Lemari Kaca Dua Pintu	1	1	-	-
27	Lemari Kaca Alumunium	1	1	-	-
28	Lemari Jati 2 Pintu	2	2		
29	Meja Rapat	26	26	-	-
30	Meja Panjang	3	3	-	-
31	Meja Komputer	9	6	-	3
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	-
33	Pesawat Telepon	4	4	-	-
34	Jam Dinding	4	4	-	-
35	Faximile	3	1	-	2
36	Layar OHP	1	1	-	-
37	Laptop	46	45	1	-
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4	-	-
39	Name Plate	25	25	-	-
40	Kaca Cermin	1	1	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
41	Lemari Rak Kayu	4	4	-	-
42	Kulkas	4	4	-	-
43	Papan Struktur	1	1	-	-
44	Mesin Ketik	5	5	-	-
45	Komputer	55	55	-	-
46	Kursi Lipat	23	23	-	-
47	LCD	2	2	-	-
48	Layar LCD	5	5	-	-
49	Mobil Panther	1	1	-	-
50	Mobil Kijang	4	2	-	2
51	Sepeda Motor	8	-	-	8
52	Proyektor+Attachment	4	4	-	-
53	Scanner	6	5	-	1
54	Televisi	5	5	-	
55	Lain-lain Horden/Firenze	Paket		-	Paket
56	Mesin Abesensi	1	1	-	-
57	Loudspeaker	2	2	-	-
58	Mesin Ketik Manual Standar	1	1	-	-
59	White Board	1	1	-	-
60	Lemari Buku untuk Perpustakaan	8	8	-	2
61	Tustel	2	2	-	1
62	Internet	Paket	Paket	-	Paket
63	Notebook	2	2	-	-
64	Meja Kayu	3	3	-	-
65	Station Wagon	1	1	-	-
66	Tanah	49 Bidang	49 Bidang	-	-
67	Peralatan dan Mesin/ Kendaraan	82 Unit	82 Unit	-	-
68	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.135 Buah	8.135 Buah	-	-
69	Bangunan dan Gedung	31 Buah	31 Buah	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
70	Bangunan dan Gedung	31 Buah	31 Buah	-	-
71	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22 Paket	22 Paket	-	-
72	Aset Tetap Lainnya	4 Paket	4 Paket	-	-
73	Meja	1 Paket	1 Paket	-	-
74	Kursi	33	33	-	-
75	Lemari	1 Paket	1 Paket	-	-
76	Kendaraan Dinas roda 4	5 Unit	5 Unit	-	-
77	Kendaraan Dinas roda 2	2 Unit	2 Unit	-	-
78	Tape	1 Paket	1 Paket	-	-
79	Kain Gorden	1 Paket	1 Paket	-	-
80	Server	9 Paket	9 Paket	-	-
81	Server LPSE	3	3	-	-
82	Camera Video (CCTV)/ Camera	2 Set/ 4 Kamera	2 Set/ 4 Kamera	-	-
83	Genset	1	1	-	-
84	UPS	31	31	-	-
85	Wireless	2	2	-	-
86	Handy Cam	3	3	-	-
87	Kamera (DSLR)	1	1	-	-
88	Memori Programmer	1	1	-	-
89	Router	5	5	-	-
90	Mesin Absensi	1	1	-	-
91	Screen (Layar)	2	2	-	-
92	Netbook Acer VS	1	1	-	-
93	Meja Piket	1	1	-	-
94	Camera Canon	4	4	-	-
95	Drone	1	1	-	-
96	Pembatas Antrian	8 Buah	8 Buah	-	-
97	Peralatan Studio Mini	1 Paket	1 Paket	-	-
98	Buku Bacaan Perpustakaan dan Perundang-undangan	154	154	-	-
99	Camera Shoting	1	1	-	-
100	Brankas	2	2	-	-
101	Speaker BOB CS 460	1 Set	1 Set	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
102	Speaker Hardwell	1 Set	1 Set	-	-
103	Power Amplifier Yamaha PA 5000 S	1 Unit	1 Unit	-	-
104	Mixer Yamaha MG82 CX	1 Unit	1 Unit	-	-
105	Keyboard Amplifier	1 Unit	1 Unit	-	-
106	Wireless Microphone Shure	1 Unit	1 Unit	-	-
107	Cable Mic Shure	2 Set	2 Set	-	-
108	Speaker Stand	2 Set	2 Set	-	-
109	Table Microphone Stand	1 Buah	1 Buah	-	-
110	Equaliser Saoundgween EQ 3100	1 Buah	1 Buah	-	-

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Guna mewujudkan visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya melalui pengoordinasian pelaksanaan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTT dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTT tersebut merupakan instrumen pengendalian atas upaya pencapaian target-target pembangunan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTT tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

## 1. VISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

## 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTT tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

### **Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

### **Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)**

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat



pengembangan pariwisata nasional.

**Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

**Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

**Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian Perangkat daerah dan lembaga teknis daerah.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu kontribusi langsung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTT dimana, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pelaksanaan Misi ke 5 (lima): **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi NTT**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-			Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
I.	BIRO PEMERINTAHAN						
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Presentase cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%
			Presentase cakupan kegiatan tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%
			Presentase cakupan kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Presentase Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	100%	100%
II	BIRO HUKUM						
1	Meningkatkan pengelolaan peraturan perundang undangan	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan.	Presentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan pengelolaan bantuan Hukum	Terwujudnya pengelolaan bantuan hukum	Presentase cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-			Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
III	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
1	Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi,pembinaan ,monitoring dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	100%	100%	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
			Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	100%	100%	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi
2	Meningkatkan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah Daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	25%	50%	75%	75%
			Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	100%	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
3	Meningkatkan kualitas tata kelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi pembangunan daerah dan wilayah di provinsi atau Kab/Kota	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%
			Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	100%	100%	8 Laporan	8 Laporan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-			Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
IV	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa.	Terlaksana proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender - Non Tender, <i>e-Purchasing</i> , Katalog).	85%	100%	100%	100%
		Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	8 orang	12 Orang	15 Orang	15 Orang
		Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Presentase Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif	90%	100%	100%	100%
V	BIRO ORGANISASI						
1.	Menciptakan Birokrasi yang profesioanl dengan karakteristik, adaptif, berintergrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Peningkatan Kualitas Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publiik yang efektif, akuntable, transparan serta partisipatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif Dan Efisien	84,78%	92,98%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-			Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
<b>VI</b>	<b>BIRO UMUM</b>						
1	Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan	Terwujudnya Pelayanan yang Professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris Daerah	100% (180 Keg)	100% (180 Keg)	100% (180 Keg)	100%
<b>VII</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>						
1	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pimpinan yang berintegritas dan profesional dengan berorientasi pada pelayanan publik	Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	Cakupan pemenuhan pelayanan keprotokolan	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan pemenuhan layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.2**  
**Misi yang didukung oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTT**

VISI		“ NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”					
MISI ke- 5		Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Formula Indikator	Program	Perangkat Daerah
<b>BIRO PEMERINTAHAN</b>							
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	Jumlah kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan/ difasilitasi dibagi dengan Target jumlah kegiatan otonomi daerah	1. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 2. Program Kesejahteraan Rakyat	Setda Provinsi NTT
			Cakupan kegiatan tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%			
			Cakupan kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%			
2	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	Jumlah kegiatan kerja sama yang difasilitasi dibagi dengan Target jumlah kegiatan Kerja sama		
3	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	Jumlah kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi dibagi dengan Target jumlah kegiatan kesejahteraan rakyat		

VISI	“ NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”						
MISI ke- 5	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Formula Indikator	Program	Perangkat Daerah
BIRO HUKUM							
1.	Meningkatkan pengelolaan peraturan perundang undangan	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan	Presentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap Tahun	100%	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diselesaikan -----x 100 % Jumlah Produk Hukum Daerah	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Setda Provinsi NTT
2.	Meningkatkan pengelolaan bantuan Hukum.	Terwujudnya pengelolaan bantuan hukum	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100%	Jumlah penyelesaian kasus hukum ----- x 100 % Jumlah kasus hukum		
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
1.	Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,	Terlaksananya koordinasi,pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	4 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda Provinsi NTT
			Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	5 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi		
2.	Meningkatkan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah Daerah untuk	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	75%	Jumlah BUMD yang berkinerja baik -----x 100% Jumlah BUMD yang ada di Provinsi NTT		
			Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi		



<b>VISI</b>	<b>“ NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”</b>						
<b>MISI ke- 5</b>	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.</b>						
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Formula Indikator</b>	<b>Program</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
	pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik					
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi pembangunan daerah dan wilayah di provinsi atau Kab/Kota	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan Daerah  Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	100%  8 Laporan	Jumlah Bagian yg menjadi Administrasi pembangunan ----- --- ×100% Jumlah Sub bagian yg menjadi Administrasi Pembangunan  Jumlah Laporan	2. Program Administrasi Pembangunan	
<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>							
1.	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan	Terlaksana proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku  Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM)	Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender - Non Tender, <i>e-Purchasing</i> , Katalog).  Jumlah jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	100%  15 Orang	Total Realisasi Pekt PBJ -----x 100% Total Paket PBJ  Realisasi Penambahan JF PPBJ -----x100%	Program Program Kebijakan Dan Pelayanan PBJ	Setda Provinsi NTT

VISI	“ NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”						
MISI ke- 5	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Formula Indikator	Program	Perangkat Daerah
	publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa.	pengelola pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa			Target Penambahan JF PPBJ		
		Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	100%	Total Paket PBJ yg menggunakan SPSE -----x100% Total Paket PBJ		
BIRO ORGANISASI							
1.	Menciptakan Birokrasi yang profesioanl dengan karakteristik, adaptif, berintergrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Peningkatan Kualitas Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publiik yang efektif, akuntable, transparan serta partisipatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif Dan Efisien	100%	Rata – rata dari Persentase =  Jlh. Capaian 6 Sub Indikator -----x100% Jlh. Sub Indikator	Program Penataan Organisasi	Setda Provinsi NTT

<b>VISI</b>	<b>“ NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”</b>						
<b>MISI ke- 5</b>	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.</b>						
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Formula Indikator</b>	<b>Program</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>BIRO UMUM</b>							
	Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan	Terwujudnya Pelayanan yang Professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris Daerah	100% (180 Keg)	Jumlah Pelayanan Tamu Pada Tahun Berjalan -----x100% Jumlah Pelayanan tamu yang direncanakan pada akhir renstra	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Setda Provinsi NTT
<b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>							
<b>1.</b>	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pimpinan yang berintegritas dan profesional dengan berorientasi pada pelayanan publik	Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100%	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan Dengan Formula Pengukuran:  Total Realisasi Layana -----x100% Total Realisasi Target	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Setda Provinsi NTT
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	Cakupan pemenuhan pelayanan keprotokolan	100%	Presentase Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan Dengan Formula Pengukuran: Total Realisasi Layanan -----x100% Total Realisasi Target		

<b>VISI</b>	<b>“ NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”</b>						
<b>MISI ke- 5</b>	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.</b>						
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Formula Indikator</b>	<b>Program</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
		Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan pemenuhan layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha	100%	Presentase Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepawaian dan tata usaha  Dengan Formula Pengukuran:  $\frac{\text{Total Realisasi Layanan}}{\text{Total Realisasi target}} \times 100\%$		

## 2.2 Rencana Kinerja

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Provinsi NTT, tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan Renstra tahun 2018-2023. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>Biro Pemerintahan</b>				
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	Cakupan Kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%
			Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%
			Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%
2	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%
3	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Presentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100%
<b>Biro Hukum</b>				
1	Meningkatan Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	Terwujudnya Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100%
2	Meningkatan Penyelesaian kasus hukum setiap tahun	Terwujudnya penyelesaian kasus hukum setiap tahun	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100%
<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>				
1	Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang	Terlaksananya koordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	4 Rekomendasi
			Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	5 Rekomendasi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Perekonomian, Sumber Daya Alam	perekonomian dan Sumber Daya Alam		
2	Meningkatkan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah Daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	75%
			Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Rekomendasi
3	Meningkatkan kualitas tata kelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi pembangunan daerah dan wilayah di provinsi atau Kab/Kota	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan Daerah	100%
			Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	8 Laporan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Tercapainya reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan public dalam pelayanan pengadaan barang/jasa	Terlaksana proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Presentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (tender - non tender, e-purchasing, katalog)	100%
		Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang/jasa	Jumlah jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	15 orang
		Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang integrasi,efisien, efektif , adil dan trasnparan bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Presentase Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>Biro Organisasi</b>				
1	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif Dan Efisien	100%
<b>Biro Umum</b>				
1	Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%
<b>Biro Administrasi Pimpinan</b>				
1	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pimpinan yang berintegritas dan profesional dengan berorientasi pada pelayanan publik	Terciptanya tata Kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100%
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	Cakupan pemenuhan pelayanan keprotokolan	100%
		Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan pemenuhan layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha	100%

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah dengan Gubernur NTT untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Sekretariat Daerah selama Tahun 2023. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahun 2023, dilakukan mekanisme pergeseran anggaran yakni *refocussing*, *redesign* anggaran, sehingga anggaran yang tidak terserap 100% pada beberapa kegiatan dialihkan serta dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Setda Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>Biro Pemerintahan</b>			
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%
<b>Biro Hukum</b>			
1	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang undangan.	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap Tahun	100%
2	Terwujudnya pengelolaan bantuan hukum	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100%
<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>			
1	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam., Sumber Daya Alam	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	4 Rekomendasi
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	5 Rekomendasi
2	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	75%
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Rekomendasi



3	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan Daerah	100%
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	8 Laporan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
1	Terlaksana proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender - Non Tender, <i>e-Purchasing</i> , Katalog).	100%
2	Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	15 Orang
3	Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	100%
Biro Organisasi			
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%
Biro Umum			
1	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%
Biro Administrasi Pimpinan			
1	Terciptanya tata Kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	Cakupan pemenuhan pelayanan keprotokolan	100%
3	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan pemenuhan layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha	100%

**Tabel 2.5**  
**Program dan Anggaran Setda Provinsi NTT Tahun 2023**

No	Program	Anggaran (Rp)
<b>I.</b>	<b>Biro Pemerintahan</b>	<b>14.687.709.420</b>
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	752.830.880
b.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	838.321.600
c.	Program Kesejahteraan Rakyat	13.096.556.940
<b>2.</b>	<b>Biro Hukum</b>	<b>1.836.253.020</b>
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	693.492.960
b.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.142.760.060
<b>3.</b>	<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>	<b>1.116.684.280</b>
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	441.685.840
b.	Program Perekonomian dan Pembangunan	574.998.700
c.	Program Adminsitras i Pembangunan	99.999.740
<b>4.</b>	<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>7.874.099.500</b>
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.855.292.000
b.	Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ	6.018.807.500
<b>5.</b>	<b>Biro Organisasi</b>	<b>1.422.476.620</b>
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	624.361.240
b.	Program Penataan Organisasi	798.115.380
<b>6.</b>	<b>Biro Umum</b>	<b>53.809.092.288</b>
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.809.092.288
<b>7.</b>	<b>Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>2.845.621.658</b>
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.845.621.658

Skema perhitungan Program dan Anggaran Sekretarias Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 dapat, dirumuskan **Total Anggaran Setda Provinsi NTT:  $\Sigma$  Total Anggaran Biro Lingkup Setda.**

**Total Anggaran Setda Provinsi NTT:** RP. 14.687.709.420 + Rp. 1.836.253.020 + Rp. 1.116.684.280 + Rp. 7.874.099.500 + Rp. 1.422.476.620 + Rp. 53.809.092.288 + Rp. 2.845.621.658 = **Rp. 83.591.936.786,-**

Dengan hasil perhitungan Rp. 83.591.936.786,- . Sesuai dengan Perubahan DPA Tahun 2023.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan dan akuntabel.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Perencanaan Strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran yang penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran seperti pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2	76% - 90,99%	Baik
3	66% - 75,99%	Cukup
4	51% - 65,99%	Kurang
5	$\leq 50,99\%$	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja organisasi terhadap target dan realisasi sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTT dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta target dan capaian realisasinya.

Pada sub bab ini disajikan kinerja Sekretariat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

### **1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada**  
**Biro Pemerintahan**

**I. BIRO PEMERINTAHAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	Sangat Baik
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	100%	Sangat Baik

**Sasaran 1 : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan**

Capaian kinerja kegiatan otonomi daerah tahun 2023 mencapai 100%, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pelantikan Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota

Biro Pemerintahan dalam melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pelantikan 6 Orang Pj. Bupati yakni Pj. Bupati Flores Timur, Pj. Bupati Lembata, Pj. Wali Kota Kupang, Pj. Bupati Sikka, Pj. Bupati Sumba Tengah dan Pj. Bupati Alor serta Pj. Wali Kota Kupang dengan kegiatan pelantikan sebanyak 6 kali.

2. Penyusunan LPPD, LKPJ, dan SPM Provinsi NTT Tahun 2022

Tersedianya dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2022, dokumen LKPJ Provinsi NTT Tahun 2022 dan dokumen SPM Provinsi NTT Tahun 2022.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama**

Capaian Cakupan Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi Tahun 2023 adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan melalui Rapat pembahasan usulan kerjasama dari Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun diluar lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rapat Inventarisasi dan analisis kerja sama daerah kabupaten/ kota dan Evaluasi kerja sama daerah kabupaten/ kota. Hasil yang dicapai yakni :

1. 38 usulan draft yang telah dibahas;
2. 22 Kesepakatan Bersama (MOU); dan
3. 16 Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani.

## **Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan kesejahteraan**

Capaian Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun) Tahun 2023 adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Verifikasi dokumen permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial bidang agama, pendidikan, dan sosial.

Jumlah proposal permohonan yang masuk dan diverifikasi :

- Permohonan Hibah pendidikan : 2 proposal
- Permohonan bansos bidang pendidikan : 1.425 proposal
- Permohonan hibah bidang kesehatan : 2 proposal
- Permohonan hibah dan bantuan sosial bidang agama : 258 proposal

Jumlah anggaran hibah yang tersedia :

- Hibah bidang pendidikan : Rp.800.000.000,-, realisasi 800.000.000,- (100%)
- Hibah bidang kesehatan Rp.400.000.000,-, realisasi Rp.400.000.000,- (100%);
- Hibah bantuan sosial Rp.545.000.000,-, tidak ada realisasi;
- Bantuan sosial bidang pendidikan 869.600.000,-, realisasi 302,400,000 (34,77%) bansos yang terealisasi adalah bantuan pendidikan bagi Taruna/Taruni Perhubungan, sedangkan beasiswa dan bantuan penelitian tidak terealisasi karena tidak didukung dengan ketersediaan anggaran;

- Bantuan sosial bidang pendidikan (Bansos untuk Yayasan Pendidikan Akademi Keperawatan Santa Elisabeth Lela) Rp.50.000.000,-, tidak realisasi.
- 2. Monitoring dan evaluasi bantuan sosial di kabupaten/kota bidang agama;
- 3. Pendampingan penyerahan hewan kurban bantaun Presiden dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 H di Kabupaten TTU.
- 4. Penyelenggaraan urusan haji (pelepasan calon jamaah haji dan penjemputan jamaah haji) di Surabaya.
- 5. Fasilitasi peringatan hari besar nasional.i Kegiatan peringatan hari besar nasional yang difasilitasi tahun 2023 adalah I Hari Lahir Pancasila, HUT Kemerdekaan RI, dan Hari Kesaktian Pancasila.

## II. BIRO HUKUM

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada**  
**Biro Hukum**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100%	204,1%	204,1%	Sangat Baik
2.	Terwujudnya pengelolaan Bantuan Hukum	Cakupan Penyelesaian Kasus Hukum yang diselesaikan setiap Tahun	100%	160%	160%	Sangat Baik

### **Sasaran 1 : Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan**

Tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap Tahun” adalah sebesar **204,1% atau** dapat dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

1. Hasil fasilitasi/evaluasi Ranperda, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan DPRD, Pemberian Nomor Register Perda, Klarifikasi



Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan rincian yakni :

- a) Hasil fasilitasi/evaluasi Ranperda sebanyak 83 Ranperda;
  - b) Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebanyak 5 Ranperbup/Ranperwali;
  - c) Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD sebanyak 1 RanperDPRD;
  - d) Pemberian nomor register perda sebanyak 124 nomor register Perda;
  - e) Hasil Klarifikasi Perda sebanyak 18 Klarifikasi Perda;
  - f) Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati/Walikota sebanyak 28 Klarifikasi.
2. Hasil pelaksanaan Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat disampaikan hasil sebagai berikut :
- a) Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam tahun 2023 sebanyak 7 Peraturan Daerah;
  - b) Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 113 Peraturan Gubernur (34 Pergub masih dalam proses);
  - c) Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur pada tahun 2023 terdapat 397 Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur yang dihasilkan dimana hingga akhir Desember 2023 masih terdapat 12 Produk Keputusan Gubernur yang masih berproses.

## **Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Bantuan Hukum**

Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja “Cakupan Penyelesaian Kasus Hukum setiap tahun” adalah sebesar 160% atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Dengan penjelasan sebagai berikut:

### ▪ **Penanganan Perkara di Pengadilan (Litigasi)**

Tim Kuasa Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur menangani 20 (dua puluh) Perkara/Gugatan yang terdiri dari:

- a) 14 (empat belas) Gugatan Perdata dan 6 (enam) Gugatan Tata Usaha Negara dengan kategori perkara lanjutan dari Tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tuntas sebanyak 10 (sepuluh) Perkara Perdata dan 3 (tiga) Gugatan Tata Usaha Negara, sedangkan Perkara/Gugatan Baru di

Tahun 2023 sebanyak 4 (empat) Perkara Perdata dan 3 (tiga) Gugatan Tata Usaha Negara.

- b) Progres penyelesaian 13 (tiga belas) perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang merupakan perkara lanjutan dari Tahun 2022 dirincikan sebagai berikut, Perkara Perdata sebanyak 10 (sepuluh) perkara, dimana 6 (enam) perkara telah selesai atau berkekuatan hukum tetap, 2 (dua) perkara dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Kupang dan 2 (dua) perkara dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sedangkan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 3 (tiga) perkara, 2 (dua) perkara telah selesai atau berkekuatan hukum tetap namun 1 (satu) perkara belum dilaksanakan eksekusi.
- c) Perkembangan penanganan 7 (tujuh) perkara di Tahun 2023 terdiri atas 4 (empat) perkara perdata dan 3 (tiga) Perkara TUN. 4 (empat) perkara perdata dimaksud dapat dirincikan: 1 (satu) perkara telah selesai atau berkekuatan hukum tetap, 1 (satu) perkara tidak ada koordinasi penanganan lanjutan, 1 (satu) perkara masih berproses di Pengadilan Negeri Kupang dan 1 (satu) perkara sedang berproses di Pengadilan Tinggi Kupang. Sedangkan perkembangan 3 (tiga) Perkara TUN di Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) perkara telah selesai atau berkekuatan hukum tetap dan 2 (dua) perkara TUN sedang berproses di PTUN Kupang.

Sepanjang Tahun 2023 Tim Kuasa Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menangani 20 (dua puluh) perkara, dengan rincian 11 (sebelas) perkara selesai atau berkekuatan hukum tetap, 8 (delapan) perkara masih berproses di pengadilan dan satu (1) perkara tidak ada koordinasi penanganan lanjutan.

1. Adapun sepanjang Tahun 2023, data perkara baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang ditangani oleh Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berkekuatan hukum tetap atau selesai antara lain:

- a. Perkara Perdata

- Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.KPG (Putusan PK Nomor: 160 PK/Pdt/2023 Tanggal 04 Mei 2023: Menolak permohonan PK dari Pemohon PK: Mohammad Hatta Alwi, SE);

- Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.END (Putusan PK Nomor: 906 PK/PDT/2022 Tanggal 28 September 2022: Menolak Permohonan PK dari Faried Sekriel Ambuwaru);
- Perkara Nomor: 208/Pdt.G/2020/PN.Kpg (Putusan Kasasi Nomor: 3429 K/Pdt/2022 Tanggal 2 November 2022: Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, Yohanis Limau);
- Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.ATB (Putusan Kasasi Nomor: 1649K/PDT/2023 Tanggal 27 Juli 2023: Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi, Marsel Bere Soro, dkk);
- Perkara Nomor: 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (Putusan Nomor: 379/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Februari 2023: Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat);
- Perkara Nomor: 555/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2023: Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat); dan
- Perkara Nomor: 96/Pdt.G/2023/PN.KPG (Putusan Nomor: 96/Pdt.G/2023/PN.KPG Tanggal 02 November 2023 yang mengeluarkan Tergugat IV dari pihak).

b. Perdata TUN

- Perkara Nomor: 09/G/2017/PN.KPG (Putusan PTUN Kupang dan PT.TUN Surabaya mengalahkan Tergugat. Putusan belum dieksekusi karena bertentangan dengan semangat Pemberantasan Korupsi);
- Perkara Nomor: 17/G/2022/PTUN-KPG (Putusan Nomor: 269 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dr. Laziosi Ailien Gunawan);
- Perkara Nomor: 66/G/2022/PTUN-KPG (Putusan Nomor: 39/B/2023/PT.TUN.MTR Tanggal 2 Oktober 2023: Menguatkan putusan PTUN Kupang Nomor: 66/G/2022/PTUN.KPG); dan
- Perkara Nomor: 8/G/2023/PTUN-KPG (Putusan Penetapan Nomor: 8/G/2023/PTUN-KPG: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima).

2. Adapun sepanjang Tahun 2023, data perkara baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang ditangani oleh Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedang berproses di pengadilan antara lain:

a. Perkara Perdata

- Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN.KPG (Proses PK di MA);
- Perkara Nomor: 157/Pdt.G/2022/PN.KPG (Proses PK di MA);
- Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN.OLM (Proses Banding di PT.Kupang);
- Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2022/PN.KPG (Proses Banding di PT.Kupang);
- Perkara Nomor: 277/Pdt.G/2022/PN.KPG (Tidak ada koordinasi lanjutan);
- Perkara Nomor: 309/Pdt.G/2022/PN.KPG (Proses Banding di PT.Kupang);  
dan
- Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2023/PN.KPG (Proses sidang di PN.Kupang agenda mediasi pada Jumat, 12 Januari 2023).

b. Perkara TUN

- Perkara Nomor: 54/G/2023/PTUN-KPG (Proses sidang di PTUN Kupang);
- Perkara Nomor: 56/G/2023/PTUN-KPG (Proses sidang di PTUN Kupang).

▪ **Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM**

Pada Tahun 2022 ini, Sub Bagian Non Litigasi dan HAM memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Aksi HAM.

Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi tingkat Provinsi sebanyak 7 pengaduan yakni :

- a) Permasalahan Penegasan Sikap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor Terkait Pemberhentian Sdri Enny Anggrek, SH dalam Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Alor
- b) Permasalahan Somasi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya (Beringin Karya) Kota Kupang kepada Ketua DPRD Kota Kupang.
- c) Permasalahan Penggusuran Lahan/Perkebunan Karet Milik Transmigran oleh PT. Setia Agro Abadi di Lokasi Long Iram I/Kampung Tri Pariq Makmur, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
- d) Permasalahan proses tindakan pidana pengrusakan hasil tanaman-tanaman dan Hutan Adat Baan Tisi, Dusun c masyarakat Desa Pilli Kec. Kie
- e) Permasalahan Permohonan Realisasi Penggantian Tanah Milik Makorem 161/WS

- f) Permasalahan Peringatan/Somasi Keluarga Besar Passar Kepada Sdr. Bernardus Bura Terkait Tanah SMAN Restorasi Doreng
- g) Permasalahan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

- **Aksi HAM**

Pelaporan Aksi HAM dilaksanakan selama 5 tahun oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Pelaporan Aksi HAM Tahun 2023 wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan kepada Kantor Staf Presiden (KSP) melalui website sistem pemantauan <https://serambi.ksp.go.id> oleh masing-masing pemegang password dan username pada Bappeda Kabupaten/Kota yang terlebih dahulu diverifikasi oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam bentuk *soft copy* (pdf) karena pelaporan menggunakan sistem aplikasi. Waktu pelaporan capaian RANHAM B04 akan dilaksanakan pada tanggal 28 April s/d 5 Mei 2023, oleh karena itu pada Triwulan I ini, Biro Hukum Setda Provinsi NTT melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se NTT melalui surat mengingatkan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2023 tersebut dengan format laporan dan format lampiran/data dukung untuk pelaporan Aksi HAM Daerah tahun 2023 (B04, B08 dan B12) dapat diunduh melalui <https://ham.go.id/download/pedoman-pelaksanaan-dan-pelaporan-aksi-ham-daerah-2023/>.

- **KKP HAM**

Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli, Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 akan melaksanakan penilaian atas capaian seluruh Kabupaten/Kota di tahun 2022 terkait dengan kriteria KKP HAM. Petunjuk pelaksanaan KKP HAM dapat diunduh pada laman <https://ham.go.id/unit-kerja/kerjasama/kkpham/>.

### III. BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada**  
**Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%	Sangat Baik
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100%	Sangat Baik
2	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik.	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	75%	75%	100%	Sangat Baik
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	Sangat Baik
3	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	8 Laporan	8 Laporan	100%	Sangat Baik

**Sasaran 1 : Terlaksananya koordinasi, pembinaan , monitoring dan evaluasi penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.**

Tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran adalah sebesar **100%** atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

**1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**

Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah secara optimal dengan uraian capaian sebagai berikut:

- a) Terlaksananya HLM TPID, 4 kali, untuk 30 orang, Lokasi Kota Kupang,
- b) RATEK TPID, 2 kali, untuk 30 Orang Lokasi Kota Kupang
- c) Sidak Pasar, 2 kali, untuk 30 orang Lokasi Kota Kupang
- d) Terlaksananya Rapat Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMI, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang
- e) Forum Grup Diskusi (FGD), 4 kali, untuk 30 org, Lokasi Kota Kupang,
- f) Rapat Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang

**2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**

Pelaksanaan pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan uraian capaian sebagai berikut:

- a) Terlaksananya pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukian Kayu Madu di Kec. Mutis
- b) Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA lokasi Kab. Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur
- c) Terlaksannnya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA lokasi Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1x, Kab. TTS, Kab. TTU

**Sasaran 2 : Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik**

Tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran adalah sebesar **100%** atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

**1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**

Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan capaian indikator sebagai berikut:

- a) Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (3x Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi;
- b) Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lok Kab Ende, Kab Alor, Kab.Kupang Kab.TTS, Kab.TTU;
- c) Terlaksananya pemantauan dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT ( PT. BPD NTT, PT. Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok);
- d) Terlaksananya Rapat sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum
- e) Terlaksananya monitoring dan evaluasi penetapan SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Kab/Kota Se-Provinsi NTT (Lok. Manggarai Barat, Ende, TTS, TTU, Belu, Alor)
- f) Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring,dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Kupang)
- g) Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pengelolaan BLUD di Prov. NTT tanggal 7 s/d 9 Februari 2023
- h) Terlaksananya koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pendirian BLUD
- i) Monev dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dalam Negeri RI Terkait kebijakan Pendirian BLUD di Prov. NTT



**Sasaran 3 : Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se-NTT**

Tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran adalah sebesar **100%** atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dengan uraian capaian sebagai berikut:

- a) Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan (APBD)
- b) Paket sebaran kegiatan APBD
- c) Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan (APBN) lokasi di kota Kupang dan Kab Kupang
- d) Terlaksananya monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah di Kab/Kota; (Lokasi Kota Kupang ,Kab. Kupang, Kab. Ngada , Kab Sikka, Kab. TTS, Kab. TTU)
- e) Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah; yang dilaksanakan 2 Kali dalam setahun dengan Lokasi Kota Kupang, Kab. TTS
- f) Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan daerah;
- g) Terlaksananya Monev pelaporan pelaksanaan PD dan wilayah.

#### IV. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada**  
**Biro Pengadaan Barang Dan Jasa**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Jumlah Paket PBJ sesuai ketentuan (Tender/Non Tender, e-purchasing, e-katalog)	100%	100% (111 Paket)	100%	Sangat Baik
2.	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	15 Orang	7 Orang	46.66%	Sangat Kurang
3	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebad dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Jumlah, Jenis dan Metode Paket PBJ menggunakan SPSE (Metode Tender Kompetitif)	100%	100%	100%	Sangat Baik

**Sasaran : 1 Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku**

**1. Proses pemilihan penyedia melalui proses tender APBD**

Perkembangan data jumlah jenis paket PBJ Tahun 2023 berdasarkan DPA-DPPA Tahun 2023, sebagai berikut:

**a) Paket PBJ sumber dana APBD (DAK/DAU)**

Tahun 2023, Biro PBJ menangani 111 Paket dengan rincian, sebanyak 110 Paket melalui mekanisme tender dan 1 Paket melalui penunjukan langsung oleh perangkat daerah/melalui e-katalog

**b) Proses pemilihan penyedia melalui proses tender APBN**

Dari total 10 Paket PBJ dana APBN TA 2023 hanya terdapat Paket pengadaan Barang yang kemudian 6 Paket diproses melalui mekanisme tender dan 4 Paket melalui penunjukan langsung oleh perangkat daerah/e-Katalog.

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ dengan sumber pembiayaan dari APBN mencapai 100%.

2. Realisasi pemilihan penyedia menggunakan metode tender

Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **111 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD (DAK/DAU)** dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD (DAK/DAU)**

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender		Penunjukan langsung/e-Katalog	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	73	145.941.316.000	73	145.941.316.000	-	-
2.	Barang	10	6.993.687.256	9	6.616.587.900	1	377.099.356
3.	Konsultansi	28	9.394.158.700	28	9.394.158.700	-	-
4.	Jasa Lain	-	-	-	-	-	-
<b>Total Paket</b>		<b>111</b>	<b>162.329.161.956</b>	<b>110</b>	<b>161.952.062.600</b>	<b>1</b>	<b>377.099.356</b>

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2023

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%,

a) DAU

Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **87 Paket PBJ yang bersumber dari DAU**. Total 87 Paket yang bersumber dari dana DAU TA. 2023 yang diserahkan ke Biro PBJ, seluruhnya selesai diproses dengan mekanisme tender sedangkan 1 Paket pengadaan barang melalui pengadaan langsung/e-katalog sehingga capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%.

b) DAK

Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **24 Paket PBJ yang bersumber dari DAK** dari total 24 Paket yang bersumber dari dana DAK TA. 2023 yang diserahkan ke Biro PBJ, seluruhnya selesai diproses dengan mekanisme

tender. Dengan memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%.

## **Sasaran 2 : Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ**

Pada Januari 2023 jumlah POKJA Pemilihan yang menangani proses pengadaan barang/jasa sebanyak 20 (dua puluh) orang dimana semuanya telah memenuhi syarat minimal sebagai anggota POKJA yaitu telah memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Level I/Dasar dan telah melalui proses seleksi menjadi anggota POKJA yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saat ini jumlah JF PPBJ sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang berkedudukan di UKPBJ sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berkedudukan di luar UKPBJ.

Target pemenuhan JF PPBJ adalah sebanyak 15 orang pada Tahun 2023, namun realisasi hanya sebanyak 7 orang sehingga pencapaian terhadap realisasi adalah 46,66%. Hal ini disebabkan karena untuk mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ yang diselenggarakan oleh LKPP RI, kurang peminat dengan alasan tingginya risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa.

## **Sasaran 3 : Terlaksananya PBJ yang terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN didukung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan beberapa aplikasi sebagai berikut:

### **1. Aplikasi SPSE 4.5**

Layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

### **2. Aplikasi SiRUP**

Media pengumuman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

### **3. Aplikasi SIKAP**

Layanan Database untuk melacak kinerja penyedia seluruh Indonesia.

### **4. e-Katalog**

Aplikasi belanja online yang menyediakan aneka produk yang dibutuhkan K/L/PD.

### **5. Toko Daring**

Aplikasi kerja sama LKPP dengan *e-commerce* untuk pengadaan langsung dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000 (LimaPuluh Juta Rupiah).

## V. BIRO ORGANISASI

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada**  
**Biro Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%	88.23%	88.23%	Baik

**Sasaran : Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif**

Target Sasaran strategis "Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien" pada tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya sebesar 88,23% sehingga capaiannya 88,23%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi penurunan 19,32%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 juga terjadi penurunan 9,86%. Hal ini dikarenakan beberapa indikator pendukung tidak mencapai target terutama indikator persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM. Berikut akan dijelaskan realisasi indikator kinerja pendukung.

**a) Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi.**

Pada Tahun 2023 target persentase kelembagaan perangkat daerah yang sesuai regulasi adalah 100% dan realisasi sebesar 100% atau seluruh Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut hasil penataan kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu:

**(1) Pemetaan dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- Pemetaan dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghasilkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Sebagai tindaklanjut dari penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 maka telah disusun 35 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .

(2) Pemetaan dan penataan terhadap Cabang Dinas dan UPTD pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditindaklanjuti dengan penyusunan

- Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan UPTD pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 (satu) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RS Jiwa Naimata Kupang sebanyak 1 (satu) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1 (satu) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Disamping itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan berbagai kegiatan lain yang mendukung pencapaian sasaran Biro antara lain:

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kelembagaan PD Kabupaten/kota melalui asistensi kelembagaan dan pemberian 16 rekomendasi kelembagaan bagi 16 kabupaten dan 1 kota.
- Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

**b) Persentase Perangkat Daerah yang telah Menyusun ANJAB ABK**

Pada tahun 2023 target persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab ABK adalah 100 % dan realisasi 100 %. Disamping itu terdapat beberapa kegiatan penataan analisis jabatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :

- Pendampingan penginputan perencanaan kebutuhan ASN dalam Aplikasi SIASN oleh BKN Republik Indonesia
- Pendampingan penginputan analisis jabatan dan beban kerja dalam Aplikasi E-Anjab ABK SIMONA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Penerbitan Rekomendasi hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja untuk seluruh Perangkat Daerah
- Penyesuaian evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dikirim ke Kemenpan dan RB untuk dilakukan validasi.

**c) Persentase Perangkat Daerah yang Tata Laksana Pemerintahan sesuai regulasi**

Pada tahun 2023 target pencapaian indikator kinerja “Persentase penerapan SOP-AP seluruh Perangkat Daerah” sebesar 100% dan terealisasi 97,43% atau sebanyak 38 Perangkat Daerah dari 39 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang telah menyusun SOP-AP. Sedangkan target indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis” pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 dan realisasi 94,87% atau sebanyak 37 Perangkat Daerah dari 39 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang menyusun proses bisnis perangkat daerah. Sampai dengan bulan Desember 2023, Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan RSUD. Prof. DR. W. Z. Yohannes Kupang.

Disamping itu terdapat beberapa kegiatan tata laksana pemerintahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :

- Desk Penyesuaian Peta Proses Bisnis dan SOP-AP berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
- Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur
- Penataan Pedoman Penggunaan Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
- Fasilitasi Implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

#### **d) Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti**

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah seluruh pengaduan yang masuk lewat aplikasi lapor SP4N! dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Pada tahun 2023 target pencapaian indikator kinerja “Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dan terealisasi 96,3%. Adapun hasil Rekapitulasi Kinerja Unit pengaduan dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SP4N-LAPOR! pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- Pengaduan yang selesai di tindak lanjuti : 23 pengaduan
- Pengaduan yang belum ditindak lanjuti : 1 pengaduan
- Pengaduan yang Dalam Proses : 3 Pengaduan

Disamping itu terdapat beberapa kegiatan tata laksana pemerintahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :

- Fasilitasi Keikutsertaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Nasional Tahun 2023.
- Pembangunan Website Lopo Inovasi Flobamorata.



- Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Provinsi NTT Tahun 2023.
- Koordinasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terhadap 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
- Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### **e) Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB**

Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP BB ( $\geq 70$ -80). Pada tahun 2023 target pencapaian indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB sebesar 100% dan terealisasi 100%. Hasil evaluasi AKIP PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi SAKIP di PD. Di mana rata-rata perolehan nilai SAKIP PD adalah 77,48. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data bahwa semua PD mendapat predikat Minimal Sangat Baik dan Memuaskan.

Disamping itu terdapat beberapa kegiatan tata laksana pemerintahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :

- Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah.
- Pembinaan dan Monitoring SAKIP di Kabupaten/Kota.
- Mengkoordinir perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk upload data-data SAKIP di e SAKIP Reviu.

#### **f) Persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM**

Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM adalah Perangkat Daerah yang langsung melayani publik yang diusulkan ke Kementerian PAN dan RB untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Pada tahun 2023 target pencapaian indikator kinerja “Persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM” sebesar 100% dan terealisasi 36,36%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 UPL yang diusulkan

mendapat predikat WBK hanya sebanyak 4 UPL dari 11 UPL Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Namun pada tahun 2022 6 PD ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor : 253/KEP/HK/2022 tentang Perangkat daerah/unit kerja prioritas pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT belum bisa diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK. Tahapan-tahapan untuk diusulkan telah dilakukan. Pada Desember 2022 telah dilakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) kepada 6 perangkat daerah prioritas yaitu DPMPTSP, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang, UPTD Laboratorium Kesehatan namun belum memenuhi persyaratan pengusulan yang ditentukan yaitu minimal memiliki nilai PMPZI 75 dan telah melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Resntra Biro maka tidak tercapai karena realisasinya hanya sebesar 36,36%.

Disamping itu terdapat beberapa kegiatan tata laksana pemerintahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :

- Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Konsultasi Penyusunan Road Map RB Pemprov NTT Periode 2023-2027 di Kemenpan RB di Jakarta
- Verifikasi dan Validasi terhadap Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- Menyusun time line Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023
- Pemberian Piagam Penghargaan Implementasi RB Tahun 2022
- Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan RB
- penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi NTT Tahun 2023

## VI. BIRO UMUM

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Kinerja Biro Umum**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya Pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik

**Sasaran : Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah**

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas sebagai unsur staf melayani Pimpinan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu; Meningkatkan Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, menetapkan beberapa unsur pelayanan meliputi;

- a) Memfasilitasi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebanyak 12 kali dengan kegiatan
- b) Memfasilitasi tamu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah lainnya sebanyak 24 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100%
- c) Memfasilitasi audiens dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Sosial Lainnya sebanyak 36 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100%
- d) Memfasilitasi kunjungan kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebanyak 108 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan

Dengan melihat pada realisasi dari unsur-unsur kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 dalam memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah di atas, maka dapat dikategorikan tingkat

realisasi kinerja pada Tahun 2023 dikategorikan sangat berhasil yaitu 100% dari 180 (seratus delapan puluh) kegiatan yang ditargetkan.

## VII. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Terciptanya tata Kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100%	103%	103%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100%	105,18%	105,18%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian setda dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha	100%	100%	100%	Sangat Baik

### **Sasaran 1 : Terciptanya tata Kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien.**

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun komunikasi aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kepala Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, menuntut sikap proaktif dalam memainkan fungsinya sebagai Juru Bicara Gubernur NTT agar terciptanya citra positif instansi pemerintah di mata masyarakat melalui Kegiatan mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan Kepala Daerah baik dalam bentuk cetakan, photo maupun data elektronik yang direalisasikan pada 3 sub kegiatan yakni: penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi pimpinan dan pengelolaan dokumentasi pimpinan dengan Tingkat Pencapaian sasaran **“Terciptanya tata kelola layanan**

**administrasi pimpinan yang efektif dan efisien”** adalah sebesar **103% atau dapat dikategorikan “Sangat Baik”**.

**Sasaran 2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan;**

Layanan keprotokolan dilaksanakan secara prima dan tepat dalam bidang fasilitasi kegiatan dan acara kedinasan maupun non kedinasan Gubernur & Wakil Gubernur, fasilitasi kunjungan tamu Gubernur & Wakil Gubernur serta fasilitasi hubungan keprtokolan dalam hal memfasilitasi kunjungan kedinasan/inspeksi Gubernur & Wakil Gubernur dengan tingkat pencapaian sasaran **“Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan”** adalah sebesar **105,18%** atau dapat dikategorikan **“Sangat Baik”**.

**Sasaran 3 : Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel**

Layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian setda dan tata usaha yang transparan dan akuntabel meliputi fungsi koordinator dalam bidang perencanaan, kepegawaian dan pelaporan pada Sekretariat Daerah yang meliputi 7 (tujuh) Biro dengan sasaran **“Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel”** mencapai tingkat capaian kinerja **100 %** atau dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

**2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100%	92,04%	92,04%	100%	96,23%	96,23%	100%	204,1%	204,1%
5	Terwujudnya pengelolaan Bantuan Hukum	Cakupan Penyelesaian Kasus Hukum yang diselesaikan setiap Tahun	100%	85,30%	85,30%	100%	66,43%	66,43%	100%	160%	160%
6	Terlaksanannya koordinasi pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Rek	4 Rek	100%
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5 Rek	5 Rek	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	25%	75%	75%	50%	75%	75%	75%	75%	100%
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2 Rek	2 Rek	100%
8	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8 Lap	8 Lap	100%
9	Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Jumlah Paket PBJ sesuai ketentuan (Tender/Non Tender, e-purchasing, e-katalog)	85%	98,78%	116,21%	100%	100%	100%	100%	100% (111 Paket)	100%
10	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	8 Orang	4 Orang	50%	12 Orang	0%	0%	15 Orang	7 Orang	46,67%
11	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebad dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Jumlah, Jenis dan Metode Paket PBJ menggunakan SPSE (Metode Tender Kompetitif)	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	84,78%	98,09%	98,09%	92,98%	107,55%	107,55%	100%	88.23%	88.23%
13	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya Pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terciptanya tata Kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien;	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100%	71,47%	89,34%	100%	93,01%	103,34%	100%	103%	103%
15	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan;	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100%	100%	125.00%	100%	98,95%	109,94%	100%	105,18%	105,18%
16	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian setda dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha	100%	97,72%	122,15%	100%	93,80%	104,22%	100%	100%	100%



### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Target Renstra 2018-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Renstra 2018-2023	Realisasi	Capaian %	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100%	100%	204,1%	204,1%	Tercapai
5	Terwujudnya pengelolaan Bantuan Hukum	Cakupan Penyelesaian Kasus Hukum yang diselesaikan setiap Tahun	100%	100%	160%	160%	Tercapai
6	Meningkatnya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan perekonomian makro dan mikro	100%	100%	100%	100%	Tercapai
		Persentase kebijakan pengelolaan SDA	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7	Meningkatnya koordinasi pembinaan,	Persentase jumlah BUMD dan	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Renstra 2018-2023	Realisasi	Capaian %	Tingkat Kemajuan
	monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	BLUD yang berkinerja baik					
		Persentase kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	100%	100%	100%	Tercapai
8	Meningkatnya tata kelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di provinsi atau kab/kota	Persentase efektifitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	Tercapai
		Laporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	100%	100%	100%	100%	Tercapai
9	Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Jumlah Paket PBJ sesuai ketentuan (Tender/Non Tender, e-purchasing, e-katalog)	100%	100%	100% (111 Paket)	100%	Tercapai
10	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	15 Orang	15 Orang	7 Orang	46,67%	Belum Tercapai
11	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebad dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Jumlah, Jenis dan Metode Paket PBJ menggunakan SPSE (Metode Tender Kompetitif)	100%	100%	100%	100%	Tercapai
12	Meningkatnyakualitas tata kelola penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%	100%	88.23%	88.23%	Belum Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Renstra 2018-2023	Realisasi	Capaian %	Tingkat Kemajuan
13	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya Pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	100%	100%	100%	Tercapai
14	Terciptanya tata Kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien;	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100%	100%	103%	100%	Tercapai
15	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan;	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100%	100%	105,18%	105,18%	Tercapai
16	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian setda dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dipilah berdasarkan 2 kategori tingkat ketercapaian realisasi terhadap target yaitu Tercapai jika realisasi mencapai target atau lebih dan Belum Tercapai, jika realisasi tidak mencapai target. Dari hasil analisis terdapat 17 Indikator Kinerja dengan kategori Tercapai atau sebesar 89.47%, sedangkan 2 kategori lainnya Belum Tercapai dengan persentase 10.53%.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTT tidak ada yang secara khusus bersesuaian dengan standar nasional. Perhitungan indikator kinerja secara nasional merupakan perhitungan yang mencakup realisasi indikator kinerja lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 3.12.

**Tabel 3.12**  
**Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	Sangat Baik	-
2	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	Sangat Baik	-
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	100%	Sangat Baik	-
4	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100%	204,1%	204,1%	Sangat Baik	-
5	Terwujudnya pengelolaan Bantuan Hukum	Cakupan Penyelesaian Kasus Hukum yang diselesaikan setiap Tahun	100%	160%	160%	Sangat Baik	-
6	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	4 Rek	4 Rek	100%	Sangat Baik	-
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan	5 Rek	5 Rek	100%	Sangat Baik	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sumber Daya Alam					
7	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	75%	75%	100%	Sangat Baik	-
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Rek	2 Rek	100%	Sangat Baik	-
8	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se - NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	Sangat Baik	-
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	8 Lap	8 Lap	100%	Sangat Baik	-
9	Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Jumlah Paket PBJ sesuai ketentuan (Tender/Non Tender, e-purchasing, e-katalog)	100%	100% (111 Paket)	100%	Sangat Baik	-
10	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	15 Orang	7 Orang	46.67%	Kurangnya minat ASN mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ yang diselenggarakan oleh LKPP- RI dengan alasan tingginya risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa.	1. Berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi NTT untuk selalu melaksanakan ujian sertifikasi PBJ Lv.1 setiap tahun; 2. Mendorong para ASN yang telah memiliki Sertifikat Lv. 1 menjadi Pelaku Pengadaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							(PPK, PP dan Pokja Pemilihan); 3. Mendorong PPK, PP maupun Pokja non-JF PPBJ untuk mengumpulkan portofolio sebagai syarat mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ; 4. Sosialisasi risiko hukum dalam PBJ.
11	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Jumlah, Jenis dan Metode Paket PBJ menggunakan SPSE (Metode Tender Kompetitif)	100%	100%	100%	Sangat Baik	-
12	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%	88.23%	88.23%	Beberapa indikator pendukung tidak mencapai target terutama indikator persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan kompetensi. 2. Penambahan ASN berdasarkan Hasil Anjab ABK 3. Meningkatkan komitmen dan konsistensi dari seluruh ASN Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (pejabat struktural dan kelompok

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							jabatan fungsional) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mewujudkan capaian kinerja Biro
13	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya Pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik	-
14	Terciptanya tata Kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif dan efisien;	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100%	103%	103%	Sangat Baik	-
15	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan;	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100%	105,18%	105,18%	Sangat Baik	-
16	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian setda dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha	100%	100%	100%	Sangat Baik	-

Dari hasil analisis keberhasilan/kegagalan realisasi/capaian yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT terdapat 2 penyebab tidak tercapainya realisasi kinerja sesuai target yaitu pada Sasaran Strategis Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ dengan Indikator Kinerja Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola PBJ terealisasi hanya 46.67% disebabkan karena kurangnya minat ASN mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ yang diselenggarakan oleh LKPP-RI dengan alasan tingginya risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa.

.Untuk menghadapi persoalan ini solusi yang dilakukan adalah:

1. Berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi NTT untuk selalu melaksanakan ujian sertifikasi PBJ Lv.1 setiap tahun;
2. Mendorong para ASN yang telah memiliki Sertifikat Lv. 1 menjadi Pelaku Pengadaan (PPK, PP dan Pokja Pemilihan);
3. Mendorong PPK, PP maupun Pokja non-JF PPBJ untuk mengumpulkan portofolio sebagai syarat mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ;
4. Sosialisasi risiko hukum dalam PBJ.

Penyebab kedua pada Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif dengan Indikator Kinerja Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien, realisasi 88,23% dan tidak mencapai target karena beberapa indikator pendukung tidak mencapai target terutama indikator persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM. Untuk mengatasi hal ini maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan kompetensi;
2. Penambahan ASN berdasarkan Hasil Anjab ABK;
3. Meningkatkan komitmen dan konsistensi dari seluruh ASN Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (pejabat struktural dan kelompok jabatan fungsional) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mewujudkan capaian kinerja Biro.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dapat dilihat pada Tabel 3.13.



**Tabel 3.13**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	609,349,600	344,928,710	56.61	
2	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	228,972,000	185,746,910	81.12	
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	100%	100%	100%	13,096,556,940	6,414,126,794	48.98	
4	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan	100%	204,1%	204,1%	690,106,980	647,497,050	93.83	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
		Daerah yang diselesaikan setiap tahun							
5	Terwujudnya pengelolaan Bantuan Hukum	Cakupan Penyelesaian Kasus Hukum yang diselesaikan setiap Tahun	100%	160%	160%	452,653,080	367,526,580	81.19	
6	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	4 Rek	4 Rek	100%	324,999,900	204,002,300	62,76	
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	5 Rek	5 Rek	100%	74,999,720	46,157,800	61,54	
7	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	75%	75%	100%	33,819,660	20,614,500	60,95	
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Rek	2 Rek	100%	141.179.420	115.713.890	81,96	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
8	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se -NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	69,999,740	58,838,700	84,06	
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	8 Lap	8 Lap	100%	30,000,000	25,885,900	86,29	
9	Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Jumlah Paket PBJ sesuai ketentuan (Tender/Non Tender, e-purchasing, e-katalog)	100%	100% (111 Paket)	100%	304,857,500	112,801,896	37	
10	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	15 Orang	7 Orang	46.67%	5,486,780,200	5,142,229,900	93.72	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
11	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Jumlah, Jenis dan Metode Paket PBJ menggunakan SPSE (Metode Tender Kompetitif)	100%	100%	100%	227,169,800	95,174,228	41.9	
12	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%	88.23%	88.23%	798,115,380	676,948,003	84.91	
13	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya Pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	100%	100%	53,809,092,288	47,214,705,470	87.74	
14	Terciptanya tata Kelola layanan administrasi	Cakupan Pelayanan	100%	103%	103%	1,151,380,038	1,108,770,934	96.3	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
	pimpinan yang efektif dan efisien;	Administrasi Pimpinan							
15	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan;	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100%	105,18%	105,18%	847,732,520	834,943,887	98	
16	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian setda dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha	100%	100%	100%	142,206,580	140,338,049	97	

Dalam pencapaian realisasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT tidak ada efisiensi penggunaan anggaran, hal ini disebabkan karena program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.

## **7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.14.

**Tabel 3.14**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**  
**ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Menunjang / Tidak menunjang</b>
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Cakupan kegiatan Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	Menunjang
2	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Cakupan kerjasama daerah yang difasilitasi setiap tahun	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	Menunjang
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan setiap tahun)	Program Kesejahteraan Rakyat	100%	Menunjang
4	Terwujudnya pengelolaan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	204,1%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Capaian 2023	Menunjang / Tidak menunjang
5	Terwujudnya pengelolaan Bantuan Hukum	Cakupan Penyelesaian Kasus Hukum yang diselesaikan setiap Tahun	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	160%	Menunjang
6	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	Menunjang
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam		100%	Menunjang
7	Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	Menunjang
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		100%	Menunjang
8	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se - NTT	Efektivitas peningkatan kinerja Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	Menunjang
		Laporan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas		100%	Menunjang
9	Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai	Persentase Jumlah Paket PBJ sesuai ketentuan (Tender/Non Tender,	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan	100%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Capaian 2023	Menunjang / Tidak menunjang
	ketentuan yang berlaku	e-purchasing, e-katalog)	Barang dan Jasa		
10	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	46.67%	Menunjang
11	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebad dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Jumlah, Jenis dan Metode Paket PBJ menggunakan SPSE (Metode Tender Kompetitif)	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Menunjang
12	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	88.23%	Menunjang
13	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya Pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	Menunjang
14	Terciptanya tata Kelola layanan administrasi	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	103%	Menunjang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Capaian 2023	Menunjang / Tidak menunjang
	pimpinan yang efektif dan efisien		Daerah Provinsi		
15	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	105,18%	Menunjang
16	Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan, kepegawaian setda dan tata usaha yang transparan dan akuntabel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	Menunjang

Pada Tahun 2023, Sekretariat Daerah Provinsi NTT memiliki 16 (Enam Belas) Sasaran Strategis dengan 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja yang diemban oleh 7 Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Hasil perhitungan realisasi dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. 17 Indikator masuk kategori Sangat Baik;
2. 1 Indikator masuk kategori Baik;
3. 1 Indikator masuk kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 (Sembilan Belas) target indikator kinerja maka hasil capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar **105,48 %**, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang **SANGAT BAIK** karena memiliki hasil capaian kinerja sasaran melebihi target yang direncanakan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang **Menunjang** pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Realisasi anggaran 7 (Tujuh) Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 beserta persentase capaiannya berdasarkan program dan kegiatan masing-masing Biro dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi APBD 7 Biro Lingkup Setda Provinsi NTT**  
**Tahun 2023**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>I.</b>	<b>Biro Pemerintahan</b>	<b>14.687.709.420</b>	<b>7.420.174.109</b>	<b>50,52</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>752.830.880</b>	<b>475.371.695</b>	<b>63,14</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.541.600	48.675.300	90,91
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.476.500	186.207.860	60,36
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.790.780	6.954.150	7,26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.278.200	155.046	87,96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.743.800	78.488.885	66,1
	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>838.321.600</b>	<b>530.675.620</b>	<b>63,3</b>
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	609.349.600	344.928.710	56,61
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	228.972.000	185.746.910	81,12
	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>13.096.556.940</b>	<b>6.414.126.794</b>	<b>48,98</b>
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	8.011.819.940	4.307.499.220	53,76
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.620.999.900	1.775.500.720	38,42
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	463.737.100	331.126.854	71,4

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2.	<b>Biro Hukum</b>	<b>1.836.253.020</b>	<b>1.584.698.450</b>	<b>86,3</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>693.492.960</b>	<b>569.674.820</b>	<b>82,14</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.994.000	96.706.000	99,7
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.168.560	250.266.300	74,45
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.238.000	73.690.000	95,35
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.047.400	149.012.520	84,41
	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1.142.760.060</b>	<b>1.015.023.630</b>	<b>88,82</b>
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	690.106.980	647.497.050	93,83
	Fasilitasi Bantuan Bantuan Hukum	452.653.080	367.526.580	81,19
3.	<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>	<b>1.116.684.280</b>	<b>867.758.530</b>	<b>77,71</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>441.685.840</b>	<b>396.645.500</b>	<b>89,8</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.616.400	14.801.400	31,08
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.090.600	198.970.880	96,08
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.278.000	36.977.430	99,19
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.648.040	93.575.740	96,82
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.052.800	52.520.050	98,99
	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>574.998.700</b>	<b>386.338.490</b>	<b>67,18</b>
	Pengelolaan koordinasi kebijakan perekonomian	324.999.900	204.002.300	62,76

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam	74.999.720	46.157.800	61,54
	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	174.999.080	136.228.390	77,85
	<b>Program Adminsitasi Pembangunan</b>	<b>99.999.740</b>	<b>84.724.600</b>	<b>84,72</b>
	Pengedalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.999.740	58.838.700	84,06
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000	25.885.900	86,29
<b>4.</b>	<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>7.874.099.500</b>	<b>7.117.006.038</b>	<b>90,39</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1.855.292.000</b>	<b>1.766.800.014</b>	<b>95,23</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.373.200	44.682.200	39,41
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.763.600	41.328.550	46,04
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.773.020	343.635.029	98,25
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.205.469.980	770.642.980	63,93
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.912.200	93.152.255	96,12
	<b>Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ</b>	<b>6.018.807.500</b>	<b>5.350.206.024</b>	<b>88,89</b>
	Pengelolaan Barang dan Jasa	227.169.800	95.174.228	41,9
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	304.857.500	112.801.896	37
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.486.780.200	5.142.229.900	93,72
<b>5.</b>	<b>Biro Organisasi</b>	<b>1.422.476.620</b>	<b>1.223.830.178</b>	<b>86,04</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>624.361.240</b>	<b>546.882.175</b>	<b>87,47</b>

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.646.400	100.230.400	99,59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.455.740	271.816.879	83,04
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	24.890.000	24.475.500	98,33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.607.000	64.245.624	99,44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.762.100	86.113.772	79,91
	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>798.115.380</b>	<b>676.948.003</b>	<b>84,91</b>
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	345.696.521	284.228.612	82,22
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	452.418.850	392.719.391	86,96
<b>6.</b>	<b>Biro Umum</b>	<b>53.809.092.288</b>	<b>47.214.705.470</b>	<b>87.74</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>53.809.092.288</b>	<b>47.214.705.470</b>	<b>87.74</b>
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.877.900	37.876.900	99.99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.447.819.900	13.658.392.671	83.04
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.216.200	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.097.197.201	18.852.560.631	93.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.712.974.000	3.748.914.865	79.54
	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/ WKDH	3.173.459.200	2.863.458.812	90.23
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.204.727.887	7.273.651.696	88.65
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.013.820.000	779.849.895	76.92
<b>7</b>	<b>Biro ADMINISTRASI Pimpinan</b>	<b>2.845.621.658</b>	<b>2.755.714.092</b>	<b>96,84</b>

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>2.845.621.658</b>	<b>2.755.714.092</b>	<b>96,84</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.616.300	150.252.067	95,33
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.089.600	110.944.899	93,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.509.720	175.785.257	97,38
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.463.000	76.718.441	99,04
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.354.280	187.989.580	98,24
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.151.380.038	1.108.770.934	96,3

b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Menteri dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenanganya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP terdapat 4 satuan kerja (satker), dengan Biro Pemerintahan sebagai sekretariat. Keempat satker tersebut adalah:

1. Satuan Kerja Sekretariat Daerah pada Biro Pemerintahan selaku unit kerja bidang pemerintahan dan unit kerja bidang hukum dan organisasi, dan unit kerja bidang keuangan;
2. Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unit kerja bidang hukum dan organisasi;
3. Satuan Kerja Bappeda Provinsi selaku unit kerja bidang perencanaan; dan
4. Satuan Kerja Inspektorat Daerah Provinsi selaku unit kerja bidang pengawasan.

Biro Pemerintahan di tahun 2023 membawahi 3 unit yaitu:

1. Unit kerja bidang pemerintahan yang berada pada Satker Sekretariat Daerah mencakup:
  - 1) Monitoring dan evaluasi kerja sama yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan rincian kegiatannya adalah:
    - Inventarisasi pelaksanaan kerja sama daerah kabupaten/kota;
    - Analisis kerja sama daerah dan konfirmasi hasil analisis
    - Penyusunan laporan dan rekomendasi
  - 2) Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) kabupaten/kota, dengan rincian kegiatannya:
    - Asistensi dan supervisi LPPD kabupaten/kota;
    - Koordinasi dalam rangka Evaluasi LPPD;
    - Konfirmasi dan reviu evaluasi LPPD kabupaten/kota.
  - 3) Fasilitasi penerimaan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri, dengan rincian kegiatannya :
    - Koordinasi penerimaan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri.
  - 4) Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota (melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan berbasis kawasan dan strategis nasional), dengan rincian kegiatan:
    - Rapat supervisi dan asistensi kabupaten/kota;
    - Koordinasi pusat dan daerah.
2. Unit kerja bidang hukum dan organisasi yaitu pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota, dengan rincian kegiatan:
  - Inventarisasi Perda Kabupaten/Kota;
  - Analisis Perda Kabupaten/Kota;
  - Penyusunan laporan dan rekomendasi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas Satker Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.651.437.000,-. Rincian besaran anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.16.

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Dana APBN**  
**Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat**  
**Satker Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun Anggaran 2023**

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>CM</b>	<b>Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>	<b>1.651.437.000</b>	<b>1.587.745.908</b>	<b>99,98</b>
CM.123 7	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	1.651.437.000	1.587.745.908	99,98
<b>PBL</b>	<b>Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>1.651.437.000</b>	<b>1.587.745.908</b>	<b>99,98</b>
PBL.00 1	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Kinerja Baik	1.651.437.000	1.587.745.908	99,98
<b>051</b>	<b>Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi</b>	<b>1.651.437.000</b>	<b>1.587.745.908</b>	<b>99,98</b>
051.0A	Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan antardaerah kab/kota di wilayahnya (melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategis nasional)	134.350.000	134.349.290	100
051.0B	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) kabupaten/ kota	253.785.000	253.775.000	100
051.0C	Monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan daerah kab/kota dalam satu provinsi	199.748.000	199.746.737	100



Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
051.0D	Pengawasan terhadap perda kab/kota	120.854.000	120.854.000	100
051.0E	Evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	147.176.000	147.096.563	99,95
051.0F	Menerima pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada menteri	166.151.000	166.116.140	99,98
051.0G	Inventarisasi dan kompilasi pelaksanaan 22 tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	187.103.000	187.102.218	100
051.ZA	Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	442.270.000	378.705.960	99,94

Berdasarkan data di atas capaian realisasi anggaran mencapai 99,98%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu 90%, maka realisasi tersebut mencapai target.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

LKIP Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTT selama Tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro.

Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 105,48%. Sebanyak 19 Indikator Kinerja, 16 Sasaran Strategis Sekretaris Daerah Provinsi NTT berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, koordinasi serta kolaborasi kerja lintas biro dan lintas sektoral.

Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 83.591.936.786,- terealisasi Rp. 68.183.886.867 (81,57%) sehingga tidak ada efisiensi dikarenakan tidak semua program/kegiatan terdananai secara maksimal dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi NTT terus berupaya mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang

kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dengan *core values* pelayan publik yang BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Kupang,      Februari 2024  
 Sekretaris Daerah  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kosmas D. Lana

PARAF HIERARKI	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Administrasi Pimpinan	
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda	

**BAB IV**

LKIP Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTT selama Tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro.

Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 105,48%. Sebanyak 19 Indikator Kinerja, 16 Sasaran Strategis Sekretaris Daerah Provinsi NTT berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, koordinasi serta kolaborasi kerja lintas biro dan lintas sektoral.

Sekretariat Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 83.591.936.786,- terealisasi Rp. 68.183.886.867 (81,57%) sehingga tidak ada efisiensi dikarenakan tidak semua program/kegiatan terdani secara maksimal dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi NTT terus berupaya mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dengan *core values* pelayan publik yang BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Kupang,      Februari 2024  
Sekretaris Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kosmas D. Lana

PARAF HIERARKI	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Administrasi Pimpinan	
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda	